

## ABSTRAK

**SITI ANTIKA, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI PT BPR MANGUN PUDIYASA YANG AGUNANYA BERUPA KARTU BPJS DI HUBUNGKAN DENGAN DENGAN PASAL 29 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.**

Perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mendukung proses pembangunan dewasa ini, sehingga dalam pelaksanaannya harus mendapat perhatian khusus karna menyangkut dana masyarakat yang tersimpan di dalamnya. Kredit adalah salah satu cara bank dalam menyalurkan dana masyarakat yang terkumpul, namun tidak semua pemberian kredit berjalan lancar seperti halnya yang terjadi pada PT BPR Mangun Pundiya yang mengeluarkan Kredit dengan agunan Berupa Kartu BPJS sehingga menimbulkan banyak masalah hingga menimbulkan kerugian.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Untuk mengetahui konsep penyelesaian kredit bermasalah Antara PT BPR Mangun Pundiya dengan Nasabah yang tidak akan menimbulkan kerugian bagi kedua pihak sehingga sesuai dengan Pasal 29 ayat 3 Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. (2). Untuk mengetahui pertanggung jawaban bagi bank yang menjadikan kartu BPJS sebagai jaminan kredit..

Metode pendekatan penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Empiris. Metode pengumpulan data yang diterapkan, diantaranya: (1) metode wawancara, (2) metode dokumen, (3) metode observasi. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan deduktif. Sesuai dengan penelitian lapangan yang telah penulis lakukan.

Teori yang diterapkan dalam penelitian ini ialah: (1) teori Kepastian hukum, (2) teori kredit dan , (3) teori jaminan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pihak BPR mangun Pundiya mengambil langkah dengan merubah memorandum direksi yang merupakan acuan dalam pemberian kredit dengan agunan BPJS salah satunya dengan menambah persyaratan, menambahkan agunan, mengurangi tingkat plafond yang di berikan dan merubah metode pembayaran angsuran kredit bagi para debitur dengan agunan BPJS. (2) pihak bank merasa tidak ada yang perlu untuk di pertanggung jawabkan karena perjanjian yang mereka buat adalah sah sesuai dengan aturan hokum yang berlaku di indonesia. Saran yang diajukan dalam Tesis ini ialah: (1) Perlu adanya kejelasan yang lebih bagi pemerintah dan badan legislative dalam membuat undang-undang agar mudah di fahami oleh masyarakat (2) baik bank maupun nasabah harus lebih hati-hati dalam menggunakan jasa perbankan agar tidak ada pihak yang di rugikan.

## **ABSTRACT**

**SITI ANTIKA : JURIDICIC REVIEW ON THE RESOLUTION OF PROBLEM CREDITS IN PT BPR MANGUN PUDIYASA WHICH THE AGENT IS TO MAKE A BPJS CARD CONNECTED WITH ARTICLE 29 ARTICLE 3 LAW NUMBER 10 OF 1998 CONCERNING BANKING.**

Banking in Indonesia has a very important role in supporting the current development process, so in its implementation it must receive special attention because it involves the public funds stored in it. Credit is one of the ways in which banks channel public funds collected, but not all lending goes smoothly as it did with PT BPR Mangun Pundiyaasa that issues loans with collateral in the form of BPJS Cards, causing many problems to cause losses.

This study aims to: (1). To find out the concept of settlement of problem loans between PT BPR Mangun Pundiyaasa and the Customer that will not cause harm to both parties so that it is in accordance with Article 29 paragraph 3 of Law No. 10 of 1998 concerning Banking. (2). To find out responsibility for banks that make BPJS cards as credit guarantees.

The writing approach method applied in this study is Juridical Empirical. Data collection methods applied include: (1) interview method, (2) document method, (3) observation method. While the analytical method used is descriptive analytical method with a deductive approach. In accordance with field research that the author has done.

Theories applied in this study are: (1) legal certainty theory, (2) credit theory and, (3) guarantee theory.

The results showed that: (1) the BPR mangun Pundiyaasa took steps by changing the memorandum of directors which is a reference in granting loans with BPJS collateral, one of which is by adding requirements, adding collateral, reducing the ceiling rate given and changing the method of repayment of credit installments for the debtor with collateral BPJS. (2) the bank feels that there is no need to be accounted for because the agreement they made is valid in accordance with legal regulations in force in Indonesia. Suggestions proposed in this Thesis are: (1) There needs to be more clarity for the government and legislative bodies in making laws so that they are easily understood by the public (2) both banks and customers must be more careful in using banking services so as not to there are parties who are harmed.